

PERAN MAKAN SIANG GRATIS DALAM JANJI KAMPANYE PRABOWO-GIBRAN DAN REALISASINYA

Kevin Angelo Pangaribuan¹, Agista Zybila Nahriva², Zaky Prasetyo Emri³,
Cristella Zevanya Simanjuntak⁴, Muthia Sakti⁵

¹⁻⁵Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received: June 2025

Revised: June 2025

Accepted: June 2025

Available online

Korespondensi: Email:

12310611276@mahasiswa.upnvj.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstract

The Free Lunch Program (MSG) is one of the main campaign promises of the Prabowo-Gibran pair that has become the focus of public attention. This study aims to examine the effectiveness, challenges, and public views on the implementation of the program in Indonesia. The problem of school children's nutrition that has an impact on the quality of education is an important basis for the urgency of this program. Using a qualitative research method based on literature studies, this study analyzed data from various literature sources and current news. The results of the study indicate that MSG has the potential to have a positive impact on nutritional status, student attendance, and the inclusiveness of the learning environment. However, challenges in terms of funding, logistics distribution, and student acceptance are obstacles that need to be resolved

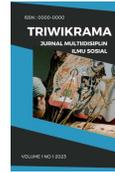
with a cross-sectoral approach and continuous evaluation. These findings are expected to be input in formulating more effective and sustainable public policies in supporting the vision of Indonesia Emas 2045.

Keywords: *free lunch, school children's nutrition, Prabowo-Gibran, education policy, vision of Indonesia Emas*

Abstrak

Program Makan Siang Gratis (MSG) merupakan salah satu janji kampanye utama pasangan Prabowo-Gibran yang menjadi sorotan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas, tantangan, dan pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut di Indonesia. Permasalahan gizi anak sekolah yang berdampak pada kualitas pendidikan menjadi dasar penting bagi urgensi program ini. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menganalisis data dari berbagai sumber literatur dan pemberitaan terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa MSG berpotensi memberikan dampak positif terhadap status gizi, kehadiran siswa, serta inklusivitas lingkungan belajar. Namun demikian, tantangan dalam aspek pendanaan, distribusi logistik, serta daya terima siswa menjadi hambatan yang perlu diselesaikan dengan pendekatan lintas sektor dan evaluasi berkelanjutan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan publik yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Kata kunci: makan siang gratis, gizi anak sekolah, Prabowo-Gibran, kebijakan pendidikan, visi Indonesia Emas

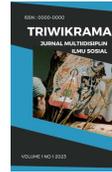


PENDAHULUAN

Pendidikan adalah tulang punggung kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia, upaya mewujudkan kualitas pendidikan yang prima demi melahirkan generasi unggul dan berdaya saing global terus dihadapkan pada berbagai kendala mendasar. Salah satu permasalahan krusial yang kerap terabaikan adalah isu gizi anak sekolah. Kekurangan gizi tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik, tetapi juga berdampak serius pada kemampuan kognitif, daya konsentrasi, partisipasi belajar, dan pada akhirnya, prestasi akademik anak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 yang menunjukkan angka *stunting* nasional masih di angka 21,6%—jauh di atas target pemerintah 14% pada 2024—merupakan alarm serius. *Stunting* bukan sekadar masalah tinggi badan, melainkan indikator utama terhambatnya potensi belajar dan produktivitas anak di masa depan. Lebih lanjut, laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengungkapkan bahwa sebagian besar siswa sekolah dasar, terutama di daerah tertinggal, datang ke sekolah tanpa sarapan atau bekal yang memadai, yang tentu saja memengaruhi performa belajar mereka.

Fenomena kurangnya asupan gizi ini tidak hanya terbatas di daerah terpencil, tetapi juga mulai meluas ke wilayah perkotaan dengan latar belakang ekonomi lemah. Anak-anak yang kurang gizi cenderung lebih rentan sakit, sering absen, dan kesulitan mengikuti pelajaran, yang pada akhirnya memperlebar jurang ketimpangan pendidikan. Merespons tantangan ini, pemerintah baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menginisiasi Program Makan Siang Gratis (MSG) sebagai salah satu prioritas nasional. Program ini diharapkan dapat menjamin kecukupan gizi bagi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia, khususnya dari keluarga kurang mampu, sebagai bagian integral dari visi Indonesia Emas 2045 untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Landasan hukum program ini juga kuat, didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pangan dan Gizi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang, yang menegaskan tanggung jawab negara dalam memastikan pertumbuhan anak-anak Indonesia yang sehat dan cerdas.

Meskipun memiliki landasan yang kuat dan tujuan mulia, implementasi Program MSG menghadapi tantangan besar, terutama terkait alokasi anggaran yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Angka ini memunculkan pertanyaan krusial tentang efektivitas pengelolaan anggaran agar tidak membebani fiskal negara. Selain itu, tantangan distribusi di daerah terpencil, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya sumber daya manusia juga menjadi kendala signifikan yang memerlukan antisipasi matang agar program ini tidak menimbulkan ketimpangan baru. Dari perspektif sosial-politik, Program MSG juga akan menjadi barometer kredibilitas pemerintahan baru dalam merealisasikan janji-janji politiknya di mata publik. Dengan kompleksitas isu gizi anak, dampak terhadap pendidikan, tantangan fiskal, hingga implementasi di lapangan, penelitian mengenai efektivitas, dampak, serta strategi optimal pelaksanaan Program Makan Siang Gratis menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu membawa manfaat maksimal bagi kesejahteraan serta perkembangan anak-anak Indonesia, mewujudkan program strategis yang mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.



1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan fondasi utama bagi pembangunan bangsa. Kualitas pendidikan yang baik akan mencetak generasi unggul yang mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Namun, di Indonesia, tantangan peningkatan mutu pendidikan masih berhadapan dengan masalah-masalah mendasar yang sering diabaikan, salah satunya adalah masalah gizi anak sekolah. Kekurangan gizi tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif, daya konsentrasi, partisipasi belajar, dan akhirnya prestasi akademik mereka.¹

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan angka *stunting* nasional masih berada di angka 21,6%, sementara target pemerintah adalah menurunkannya hingga 14% pada 2024. Ini menjadi alarm serius, mengingat *stunting* bukan hanya masalah tinggi badan, tetapi juga menyangkut kemampuan belajar, produktivitas, dan kualitas hidup anak di masa depan. Di sisi lain, laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga mengungkapkan bahwa sekitar 10-15% siswa sekolah dasar di daerah tertinggal datang ke sekolah tanpa sarapan atau bekal yang cukup. Fenomena ini jelas berdampak pada performa belajar mereka di sekolah.²

Fenomena kurangnya asupan gizi ini tidak hanya terjadi di daerah tertinggal, tetapi juga mulai merambah ke wilayah perkotaan dengan latar belakang keluarga ekonomi lemah. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang tidak mendapatkan asupan gizi cukup cenderung lebih mudah sakit, sering absen dari sekolah, serta mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Akibatnya, capaian akademik pun menjadi rendah, dan ketimpangan pendidikan makin melebar.

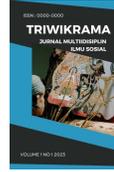
Menanggapi tantangan ini, pemerintah baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menggagas Program Makan Siang Gratis (MSG) sebagai salah satu program prioritas nasional. Program ini bukan hanya sekadar janji politik populis, tetapi menjadi bagian integral dari visi besar Indonesia Emas 2045 yang menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Melalui program ini, pemerintah berharap dapat menjamin kecukupan gizi bagi anak-anak sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Landasan hukum program ini cukup kuat, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pangan dan Gizi; serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang. Semua regulasi ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dengan sehat, cerdas, dan siap bersaing.

Namun, urgensi program ini tidak hanya berhenti pada aspek kesehatan dan pendidikan saja. Berdasarkan hitungan awal Kementerian Keuangan, anggaran yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan Program MSG secara nasional mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Angka ini sangat besar dan tentu menjadi perhatian serius, karena jika pengelolaan anggarannya tidak efektif, dikhawatirkan justru akan membebani fiskal negara, menambah defisit, atau bahkan mengancam program-program prioritas lain. Dengan demikian, pertanyaan besar muncul: Bagaimana memastikan efektivitas program ini agar benar-benar tepat sasaran, efisien, dan berdampak nyata?

¹ Triana, F. R. D., & Amali, M. T. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Program Kerja Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Dalam Media Online Liputan6. Com Dan Republika. co. id. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 13(3), 603-614.

² Maharani, P. A., Namira, A. R., & Chairunnisa, T. V. (2024). Peran makan siang gratis dalam janji kampanye prabowo gibran dan realisasinya. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 1-10.



Selain masalah anggaran, tantangan implementasi lain juga tidak bisa diabaikan, seperti masalah distribusi makanan di daerah terpencil, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola program ini secara merata. Sebagai contoh, di wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), tantangan geografis dan logistik sering membuat program bantuan pemerintah tidak optimal. Jika tantangan ini tidak diantisipasi sejak awal, program yang seharusnya membawa kebaikan justru bisa memunculkan ketimpangan baru.

Di sisi lain, dari perspektif sosial-politik, publik saat ini semakin kritis dalam menilai janji-janji politik. Program MSG akan menjadi ujian besar bagi kredibilitas pemerintahan baru: Apakah mampu merealisasikan janji besar yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat, atau justru akan gagal karena perencanaan dan eksekusi yang buruk? Masyarakat juga akan menilai apakah program ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi anak-anak mereka, atau hanya menjadi proyek pencitraan politik semata.

Dengan melihat semua faktor di atas—mulai dari urgensi masalah gizi, potensi dampak terhadap pendidikan, tantangan fiskal, hingga tantangan implementasi di lapangan—penelitian mengenai efektivitas, dampak, serta strategi optimal pelaksanaan Program Makan Siang Gratis menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi penyusunan kebijakan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu membawa manfaat maksimal bagi kesejahteraan serta perkembangan anak-anak Indonesia. Dengan penelitian yang matang, Indonesia tidak hanya akan memiliki program populis, tetapi juga program strategis yang benar-benar mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

2. Rumusan Masalah

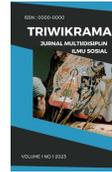
- 1) Seberapa efektifkah Program Makan Siang Gratis dalam memperbaiki gizi dan meningkatkan hasil belajar anak sekolah?
- 2) Dalam pandangan masyarakat, apakah besarnya anggaran Program Makan Siang Gratis merupakan investasi berkelanjutan untuk generasi muda atau potensi beban fiskal di masa depan?
- 3) Apa saja kendala utama dalam menjalankan Program Makan Siang Gratis di lapangan, dan bagaimana solusinya?
- 4) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap Program Makan Siang Gratis?

PEMBAHASAN

1. Efektivitas Program Makan Siang Gratis dalam Memperbaiki Gizi dan Meningkatkan Hasil Belajar Anak Sekolah

Program makan siang gratis di sekolah merupakan salah satu kebijakan yang telah dijalankan di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan tujuan utama untuk memperbaiki status gizi anak-anak dan mendukung perkembangan intelektual mereka. Berdasarkan hasil tinjauan sistematis dari berbagai penelitian yang dilakukan pada rentang tahun 2014 hingga 2024, ditemukan bahwa program makan gratis di sekolah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap status gizi siswa. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa program ini mampu meningkatkan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan menurunkan prevalensi anemia pada anak-anak, terutama di tingkat sekolah dasar.³ Peningkatan IMT dan penurunan anemia sangat penting karena kedua indikator ini berkaitan langsung dengan kesehatan fisik dan kualitas konsentrasi siswa di kelas.

³ Efektivitas Program Makan Gratis pada Status Gizi Siswa Sekolah Dasar. *Manuju: Jurnal Pendidikan, Manajemen, dan Humaniora*, 2025.



Selain itu, penelitian oleh *World Food Programme* juga menyebutkan bahwa pemberian makan siang di sekolah dapat meningkatkan asupan energi anak hingga 20-30% dari kebutuhan harian mereka.⁴ Hal ini tentu berdampak positif terhadap stamina dan kemampuan belajar siswa. Anak-anak yang sebelumnya sering merasa lemas atau kurang bersemangat karena kekurangan asupan gizi, kini menjadi lebih aktif dan siap menerima pelajaran. Selain itu, program ini juga terbukti mampu meningkatkan kehadiran siswa di sekolah. Banyak anak dari keluarga kurang mampu yang sebelumnya sering absen karena tidak memiliki uang saku untuk membeli makanan, kini menjadi lebih rajin datang ke sekolah karena kebutuhan makan mereka sudah terpenuhi.⁵

Namun, efektivitas program ini tidak lepas dari tantangan di lapangan. Misalnya, penelitian oleh mahasiswa FKM UNEJ di Jember menemukan bahwa meskipun mayoritas siswa memiliki status gizi yang baik, terdapat tantangan terkait daya terima makanan dan kesesuaian standar porsi dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Beberapa menu kurang diminati oleh siswa, seperti sayur asem, sehingga seringkali makanan terbuang sia-sia. Selain itu, kesesuaian porsi dengan standar gizi yang direkomendasikan juga belum sepenuhnya tercapai, baik untuk asupan energi, protein, lemak, maupun karbohidrat.⁶ Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian menu agar program ini benar-benar efektif dalam memperbaiki gizi dan mendukung hasil belajar siswa.

Lebih jauh lagi, selain dampak langsung terhadap fisik dan kehadiran siswa, program Makan Siang Gratis juga membawa efek psikososial yang penting. Anak-anak dari keluarga miskin sering merasa minder ketika tidak membawa bekal ke sekolah atau tidak bisa membeli makanan di kantin. Dengan adanya program ini, suasana belajar menjadi lebih setara dan inklusif. Semua siswa mendapat perlakuan yang sama, yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan semangat belajar mereka. Guru-guru juga melaporkan bahwa siswa menjadi lebih fokus di kelas, tidak lagi mengeluh lapar, dan menunjukkan peningkatan dalam partisipasi pembelajaran.⁷

Tak hanya itu, dalam jangka panjang, program ini dapat berkontribusi pada penurunan angka putus sekolah. Banyak kasus di mana anak-anak ditarik dari sekolah karena orang tua merasa tidak mampu menyediakan kebutuhan sehari-hari, termasuk makan siang. Ketika beban ini diambil alih oleh negara, orang tua merasa lebih terbantu dan terdorong untuk terus menyekolahkan anak-anak mereka. Oleh karena itu, efektivitas program tidak hanya bisa diukur dari status gizi, tetapi juga dari penurunan angka *drop-out*, peningkatan nilai ujian, dan jumlah siswa yang lulus tepat waktu.

Namun demikian, efektivitas jangka panjang membutuhkan kesinambungan dan pengawasan yang konsisten. Pemerintah tidak cukup hanya membagikan makanan, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan tersebut bergizi, aman, disukai anak-anak, dan dimasak sesuai standar kebersihan. Diperlukan juga pelatihan bagi penyedia makanan dan tenaga pengawas di sekolah. Jika kualitas makanan menurun atau tidak sesuai dengan selera anak-anak, maka tujuan gizi tidak akan tercapai, dan anak-anak bisa kembali enggan makan. Oleh karena itu, penguatan sistem *monitoring* dan evaluasi mutlak dibutuhkan untuk menjaga efektivitas jangka panjang dari program ini.⁸

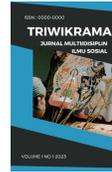
⁴ Mengatasi Kekurangan dalam Program Makan Bergizi Gratis. *Detik News*, 17 Januari 2025.

⁵ Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis dalam Mengurangi Malnutrisi pada Anak Sekolah. *Binus University*, 11 April 2025.

⁶ Siswa Kurang Suka Makan Bergizi Gratis? Studi Mahasiswa FKM UNEJ di Jember. *FKM UNEJ*, 6 Februari 2025.

⁷ Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis dalam Mengurangi Malnutrisi pada Anak Sekolah, *BINUS University*, 11 April 2025.

⁸ Siswa Kurang Suka Makan Bergizi Gratis? Studi Mahasiswa FKM UNEJ di Jember, *FKM UNEJ*, 6 Februari 2025.



2. Besarnya Anggaran Program Makan Siang Gratis: Investasi Berkelanjutan atau Potensi Beban Fiskal?

Program makan siang gratis memang membutuhkan anggaran yang sangat besar. Misalnya, pada tahun 2023, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) mencatat bahwa total biaya program makan siang gratis di Indonesia mencapai Rp10 triliun, dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024, biaya program diperkirakan mencapai Rp12 triliun, atau meningkat sekitar 20% dari tahun sebelumnya.⁹ Anggaran ini dialokasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan kepada pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan program sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola dana tersebut.

Peningkatan biaya program yang signifikan ini memang menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pembuat kebijakan. Jika tidak dikelola dengan baik, program ini bisa menjadi beban fiskal yang berat bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Terlebih lagi, DAU memiliki jumlah yang terbatas, sehingga jika porsi untuk program makan siang gratis terus meningkat, maka alokasi dana untuk program-program lain seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan lain bisa berkurang. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah-daerah tersebut.

Namun, di sisi lain, program makan siang gratis juga dianggap sebagai investasi berkelanjutan untuk generasi muda. Dengan memastikan anak-anak memperoleh gizi yang cukup, negara berharap dapat menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.¹⁰ Jika program ini berhasil dijalankan, maka manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang, baik dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun penurunan angka *stunting* dan penyakit terkait gizi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan agar anggaran yang besar ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam hal fiskal, kekhawatiran terbesar masyarakat adalah kemampuan negara untuk membiayai program ini secara berkelanjutan, terutama ketika krisis ekonomi global, inflasi pangan, dan defisit APBN menjadi ancaman nyata. Pemerintah harus cermat menyeimbangkan antara belanja sosial dengan pembangunan sektor lain. Jika alokasi terlalu besar untuk makan siang gratis, dikhawatirkan akan menggerus anggaran untuk kesehatan, infrastruktur, atau bahkan penanganan bencana. Namun, penting diingat bahwa belanja pada program gizi anak bukan sekadar biaya, melainkan bentuk investasi sosial yang akan memberikan imbal hasil besar di masa depan.

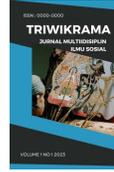
Berbagai studi menunjukkan bahwa setiap 1 dolar yang diinvestasikan untuk nutrisi anak akan menghasilkan hingga 16 dolar dalam bentuk produktivitas dan penghematan biaya kesehatan di masa depan. Artinya, meskipun saat ini anggaran tampak besar, manfaat jangka panjang dari anak-anak yang sehat, cerdas, dan produktif akan jauh lebih besar. Oleh karena itu, strategi pembiayaan program harus didesain sedemikian rupa agar efisien dan tidak mengorbankan pos anggaran lainnya. Salah satu opsi adalah dengan memanfaatkan skema pembiayaan campuran, seperti kerjasama dengan swasta, BUMN pangan, CSR perusahaan lokal, dan penggalangan dana publik.¹¹

Selain itu, penting untuk menghindari pemborosan anggaran dengan memastikan tidak ada tumpang tindih antar program, tidak ada *markup* bahan makanan, dan tidak terjadi praktik korupsi. Pengawasan ketat oleh BPK, KPK, serta partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar

⁹ Evaluasi Program Makan Siang Gratis Serta Dampak terhadap Keuangan Negara. *Kumparan*, 18 Juni 2024.

¹⁰ Respon Masyarakat Terhadap Program Makan Siang Gratis. *Maxima Polhub*, 12 Agustus 2024.

¹¹ Evaluasi Program Makan Siang Gratis Serta Dampak terhadap Keuangan Negara, *Kumparan*, 18 Juni 2024.



program ini tidak menjadi ladang penyimpangan anggaran. Evaluasi anggaran secara berkala juga harus dilakukan untuk mengukur rasio biaya dan manfaat dari program ini secara transparan.

3. Kendala Utama dalam Pelaksanaan Program Makan Siang Gratis dan Solusi yang Dapat Diterapkan

Pelaksanaan program makan siang gratis di lapangan tidak lepas dari berbagai kendala. Pada hari pertama pelaksanaan program di 26 provinsi, misalnya, muncul berbagai masalah seperti belum adanya petunjuk teknis, kendala dengan pihak catering, terbatasnya dapur umum, serta keterbatasan anggaran di beberapa daerah. Hal ini menyebabkan program tidak bisa berjalan optimal di semua sekolah, terutama di daerah terpencil yang memiliki infrastruktur yang kurang memadai.

Tantangan lain yang sering muncul adalah terkait distribusi makanan. Di beberapa daerah, seperti Brebes, Jawa Tengah, dan Makassar, ditemukan keterlambatan distribusi makanan akibat keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur.¹² Selain itu, banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas dapur yang memadai untuk menyimpan atau mempersiapkan makanan, sehingga sangat bergantung pada pihak ketiga atau catering. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah kualitas dan keamanan makanan, terutama jika catering tidak memenuhi standar gizi yang berlaku.

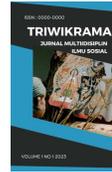
Selain itu, tantangan lain adalah terkait daya terima makanan oleh siswa. Penelitian di Jember menunjukkan bahwa sebagian siswa kurang menyukai menu tertentu, seperti sayuran, sehingga makanan sering terbuang sia-sia. Hal ini mencerminkan kurangnya penyesuaian menu dengan kebiasaan makan lokal, serta kurangnya edukasi gizi kepada siswa dan orang tua. Selain itu, kesesuaian standar porsi dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) juga belum sepenuhnya tercapai, baik untuk asupan energi, protein, lemak, maupun karbohidrat.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan adanya petunjuk teknis yang jelas, pengawasan yang ketat, serta pelibatan masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan program. Selain itu, penting untuk melakukan edukasi gizi kepada siswa dan orang tua agar mereka memahami pentingnya konsumsi makanan bergizi. Solusi lain yang bisa dipertimbangkan adalah optimalisasi sumber daya lokal, seperti melibatkan petani atau produsen makanan lokal dalam penyediaan bahan baku, serta meningkatkan partisipasi sektor swasta melalui skema kemitraan publik-privat (KPS).

Dalam kenyataannya, pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua daerah memiliki kesiapan yang sama. Sekolah-sekolah di kota besar mungkin memiliki akses catering, dapur sekolah, dan pengelolaan logistik, tetapi sekolah di daerah terpencil sering kesulitan bahkan untuk mendapatkan air bersih dan listrik. Ini menimbulkan kesenjangan antara daerah maju dan tertinggal dalam pelaksanaan program. Jika tidak ditangani dengan strategi yang tepat, program ini bisa menimbulkan ketidakadilan baru: anak-anak di kota mendapat makanan sehat dan lengkap, sementara anak-anak di desa hanya mendapat makanan seadanya atau tidak konsisten.

Solusinya, pemerintah perlu membuat kebijakan berbasis kondisi daerah, bukan satu model seragam untuk semua wilayah. Di daerah terpencil, misalnya, pemerintah bisa bekerja sama dengan koperasi desa, kelompok tani lokal, atau dapur komunitas. Ini bisa sekaligus memberdayakan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Di sisi lain, teknologi digital bisa digunakan untuk pemantauan program secara

¹² Mengatasi Kekurangan dalam Program Makan Bergizi Gratis. *Detik News*, 17 Januari 2025.



real-time, seperti laporan harian makanan yang disajikan, daftar siswa penerima, hingga pelaporan keuangan berbasis sistem *online* yang dapat diakses publik.¹³

Penting juga dilakukan pelatihan kepada kepala sekolah, guru, dan komite sekolah agar mereka tidak hanya menjadi pelaksana pasif, tetapi turut aktif mengawasi dan mengevaluasi jalannya program. Pemerintah daerah juga perlu mengintegrasikan pelaksanaan program dengan program kesehatan sekolah, seperti program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dan penyuluhan gizi. Dengan pendekatan lintas sektor seperti ini, program makan siang gratis akan lebih kuat secara kelembagaan dan lebih siap menjawab tantangan di lapangan.

4. Pandangan Masyarakat terhadap Program Makan Siang Gratis

Pandangan masyarakat terhadap program makan siang gratis sangat beragam, tergantung pada latar belakang sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan informasi yang diterima. Masyarakat dari kalangan kurang mampu cenderung sangat mendukung program ini karena dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga, terutama bagi mereka yang memiliki banyak anak usia sekolah. Dengan adanya program ini, orang tua tidak perlu lagi khawatir tentang biaya makan anak di sekolah, sehingga bisa mengalokasikan uang untuk kebutuhan lain atau menabung.

Selain itu, masyarakat juga melihat program ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih memahami manfaat jangka panjang dari program ini, seperti peningkatan prestasi belajar anak dan peningkatan status gizi. Berita-berita positif tentang keberhasilan program ini juga dapat meningkatkan dukungan masyarakat, sementara berita negatif bisa menimbulkan keraguan.

Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang mempertanyakan efektivitas dan efisiensi program, terutama terkait dengan pengelolaan anggaran dan risiko terjadinya *food waste* (pemborosan makanan). Beberapa orang juga mengkhawatirkan kualitas makanan yang disediakan, apakah sudah memenuhi standar gizi yang baik atau belum. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa program ini bisa membuat masyarakat menjadi terlalu bergantung pada bantuan pemerintah, sehingga mengurangi motivasi untuk bekerja keras.

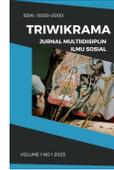
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang respon masyarakat terhadap program makan siang gratis di suatu daerah tertentu, perlu dilakukan survei atau penelitian lebih lanjut. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi keberhasilan program ini antara lain tingkat partisipasi siswa, perubahan status gizi, perubahan prestasi belajar, serta penghematan biaya keluarga.

Untuk memperkuat dukungan publik, penting bagi pemerintah melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, bukan hanya saat pelaksanaan. Misalnya, dengan mengajak orang tua siswa dalam penyusunan menu makanan agar sesuai dengan budaya makan lokal. Selain itu, media sosial bisa menjadi sarana efektif untuk menampilkan keberhasilan program secara transparan, misalnya dengan menampilkan testimoni siswa, guru, dan orang tua dari berbagai daerah. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik dan membentuk opini positif terhadap program.¹⁴

Sebaliknya, jika komunikasi publik tidak dijaga, potensi salah paham akan meningkat. Misalnya, jika muncul berita tentang makanan basi atau distribusi terlambat, masyarakat bisa langsung menyimpulkan bahwa program gagal, padahal mungkin itu hanya terjadi di beberapa titik saja. Oleh karena itu, komunikasi risiko juga penting. Pemerintah perlu terbuka mengenai tantangan di lapangan dan menunjukkan langkah-langkah konkret untuk memperbaikinya.

¹³ Mengatasi Kekurangan dalam Program Makan Bergizi Gratis, *Detik News*, 17 Januari 2025.

¹⁴ Respon Masyarakat Terhadap Program Makan Siang Gratis, *Maxima Polhub*, 12 Agustus 2024.



Pandangan masyarakat akan menjadi kunci keberlanjutan program. Jika masyarakat merasa program ini membantu kehidupan mereka secara nyata, maka dukungan terhadap pemerintah akan meningkat. Namun jika program hanya terlihat besar di atas kertas, tetapi tidak dirasakan manfaatnya secara langsung, maka kepercayaan publik akan turun, dan resistensi akan muncul, terutama dari kelompok yang merasa tidak dilibatkan. Maka, transparansi, partisipasi, dan edukasi publik menjadi tiga pilar utama agar program makan siang gratis dapat diterima dan didukung secara luas oleh masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

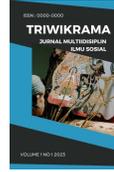
1. Kesimpulan

Program Makan Siang Gratis (MSG) yang diinisiasi pemerintah Indonesia merupakan langkah strategis untuk mengatasi masalah gizi anak sekolah yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan masa depan bangsa. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan status gizi, kehadiran, dan konsentrasi belajar siswa, serta menurunkan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain manfaat fisik dan akademik, MSG juga berkontribusi pada terciptanya suasana belajar yang lebih inklusif dan setara di sekolah, meningkatkan rasa percaya diri serta partisipasi siswa.

Namun, implementasi program ini dihadapkan pada tantangan besar, terutama terkait kebutuhan anggaran yang sangat besar dan potensi beban fiskal bagi negara jika pengelolaan tidak efisien. Selain itu, kendala distribusi di daerah terpencil, keterbatasan infrastruktur, dan sumber daya manusia juga menjadi hambatan signifikan yang harus diantisipasi agar pelaksanaan program tidak menimbulkan ketimpangan baru. Efektivitas program juga sangat dipengaruhi oleh kualitas, keamanan, dan penerimaan makanan oleh siswa, sehingga *monitoring* dan evaluasi berkelanjutan sangat diperlukan.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, agar Program Makan Siang Gratis dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, pemerintah perlu memperkuat sistem *monitoring* dan evaluasi secara berkala untuk memastikan makanan yang diberikan benar-benar bergizi, aman, dan sesuai dengan selera anak-anak. Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efisien dan transparan agar tidak membebani fiskal negara dan tidak mengorbankan program prioritas lain. Partisipasi masyarakat, orang tua, dan pihak sekolah sangat penting dalam perencanaan menu, distribusi, serta pengawasan kualitas makanan agar program tepat sasaran dan diterima baik oleh siswa. Pemerintah daerah juga perlu diberikan pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan program, terutama di wilayah 3T, agar pelaksanaan berjalan efektif dan merata. Selain itu, penyesuaian menu secara berkala berdasarkan evaluasi daya terima siswa dan pemenuhan standar gizi harus terus dilakukan agar tidak terjadi pemborosan makanan dan tujuan program tercapai optimal. Penelitian lanjutan mengenai dampak jangka panjang program terhadap prestasi akademik, kesehatan, dan ketimpangan pendidikan juga perlu terus dilakukan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Dengan strategi yang tepat dan pengawasan yang kuat, Program Makan Siang Gratis dapat menjadi investasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.



DAFTAR PUSTAKA

- Adroque, C., & Orlicki, M. E. (2013). "Do in-school feeding programs have an impact on academic performance and dropouts? The case of public schools in Argentina". *Education Policy Analysis Archives*, 21(50).
- Detik News. (2025, Januari 17). "Mengatasi kekurangan dalam program makan bergizi gratis".
- Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. (2025, February 6). "Siswa kurang suka makan bergizi gratis? Studi mahasiswa FKM UNEJ di Jember ungkap tantangan program makan siang di sekolah".
- Kumparan. (2024, Juni 18). "Evaluasi program makan siang gratis serta dampak terhadap keuangan negara".
- Maximapolhub. (2024, August 12). "Respon masyarakat terhadap program makan siang gratis".
- Maharani, P. A., Namira, A. R., & Chairunnisa, T. V. (2024). "Peran makan siang gratis dalam janji kampanye Prabowo Gibran dan realisasinya". *Journal of Law and Social Society*, 1(1), 1-10.
- Tempo.co. (2024, February 28). "Ancaman defisit anggaran: Program makan siang dan susu gratis akan mempersempit ruang fiskal pemerintah".
- Triana, F. R. D., & Amali, M. T. (2024). "Analisis framing pemberitaan program kerja makan siang gratis Prabowo-Gibran dalam media online Liputan6.com dan Republika.co.id". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 13(3), 603-614.
- Universitas Bina Nusantara. (2025, April 11). "Efektivitas program makan bergizi gratis dalam mengurangi malnutrisi pada anak sekolah". *BINUS Research News*.
- Varellia. (2025, January 14). "Tantangan dalam penerapan program makan siang gratis: Dari anggaran, logistik, hingga kualitas makanan". Kompasiana.
- World Food Programme. (n.d.). *School feeding: Investing in nutrition and education*.